

**KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI TAHUN 2021
DI KABUPATEN MAJENE**

MUH. GUFRAN THAMRIN
NPP. 29.1947

*Asdaf Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi
Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email:

muhgufranthamrin@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research) The implementation of Disaster Management is a series of efforts that includes three stages, namely before the disaster, emergency response and after the disaster. The purpose of disaster management is to ensure the implementation of disaster management in a well-coordinated and integrated manner. In the implementation phase of the 2021 earthquake disaster management in Majene Regency, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is an agency that has the task and role of disaster management in the region and acts as a coordinating agency with related disaster management agencies. Objective to describe how the Regional Disaster Management Agency (BPBD) coordinates to deal with the earthquake that occurs in 2021 and to analyze the influence of the Majene Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) regarding the coordination of earthquake disaster management in 2021.* **Method:** *The research method used in this study is the Mixed method, which uses a combination of research procedures, with one method being more dominant than other methods.* **Result** *BPBD coordination in handling the 2021 earthquake in Majene Regency has gone quite well. This can be seen from the analysis carried out in quantitative data carried out with descriptive analysis techniques with the results that the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in disaster management in Majene Regency is in the moderate category with a presentation of 49.2%. BPBD coordination in handling the 2021 earthquake in Majene Regency has gone quite well. This can be seen from the analysis carried out in quantitative data carried out with descriptive analysis techniques with the results that the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in disaster management in Majene Regency is in the medium category with a presentation of 49.2%.* **Conclusion** *coordination in the management of the 2021 earthquake disaster carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Majene Regency has gone well. The type of coordination between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Majene Regency is the type of horizontal interrelated coordination. Horizontal interrelated coordination is coordination between agencies whose duties and functions are not the same, but agencies that are interrelated with one another or have internal and external links at the same level.*

Keywords : *Coordination, Disaster Management, Earthquake*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan rangkaian upaya yang meliputi tiga tahapan, yaitu sebelum bencana, tanggap darurat dan setelah bencana. Tujuan dalam penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu dengan baik. Dalam tahap pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan instansi yang mempunyai tugas dan peran penanggulangan bencana di daerah serta berperan sebagai lembaga koordinasi dengan instansi penanggulangan bencana terkait. **Tujuan** untuk mendeskripsikan bagaimana koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menghadapi gempa yang terjadi pada tahun 2021 dan untuk menganalisis pengaruh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene tentang koordinasi penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021. **Metode:** Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Mixed methods, yaitu menggunakan kombinasi prosedur penelitian, dengan satu metode lebih dominan dari metode lain. **Hasil/Temuan** koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditinjau dari analisis yang dilakukan dalam data kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dengan hasil bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Majene dalam kategori sedang dengan presentasi 49,2%. koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditinjau dari analisis yang dilakukan dalam data kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dengan hasil bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Majene dalam kategori sedang dengan presentasi 49,2%. dalam penanganan bencana gempa bumi terjadi koordinasi antara BPBD Kabupaten Majene dengan Dinas Sosial Kabupaten Majene, Dinas Kesehatan Majene, Dinas PUPR Kabupaten Majene, dan TNI/POLRI. **Kesimpulan** : koordinasi dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah berjalan dengan baik. Adapun tipe koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene adalah tipe koordinasi horizontal interrelated. Koordinasi horizontal interrelated adalah koordinasi antara instansi yang tugas dan fungsinya tidak sama, namun instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau memiliki kaitan secara intern maupun ekstern yang levelnya setara.

Kata kunci: : Koordinasi, Penanggulangan bencana, Gempa Bumi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi dikarenakan letak geologis dan geografisnya. Secara geologis, Indonesia terletak dipersimpangan empat lempeng utama Eurasia, India, Australia, Filipina, dan Pasifik yang membuat Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Fenomena-fenomena yang telah terjadi hingga saat ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai laboratorium bencana, karena hampir di seluruh wilayahnya sering terjadi bencana. Data BNPB sejak awal Januari hingga akhir Agustus tahun 2021, tercatat jumlah kejadian yang telah terjadi di Indonesia mencapai 1.805 kejadian yang didominasi oleh bencana alam hidrometeorologi seperti banjir 733 kejadian, longsor 342, cuaca ekstrem 475 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 205, gempa bumi 23, abrasi dan gelombang pasang 22 dan kekeringan sebanyak 5 kejadian . Gempa bumi sering terjadi di Indonesia, karena wilayah Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik yang merupakan jalur berkumpulnya pegunungan di sekitar Pasifik. Sejak terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dasar hukum tentang penanggulangan bencana di Indonesia yang dimana isinya mengatur tentang tahapan pelaksanaan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan, yaitu pra-bencana, saat terjadi bencana, pasca bencana dan operasi, perencanaan dan pembiayaan.

Dalam melaksanakan isi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah kemudian mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang kemudian lebih lanjut diatur didalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Data Gempa Tahun 2020 Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, jumlah gempa yang tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2020 sebanyak 8264 kali. Provinsi Sulawesi Barat memiliki enam kabupaten/kota dan memiliki jumlah penduduk 1.355.554 (BPS, 2019) dan kepadatan penduduk 61 jiwa per kilometer persegi.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2019, Provinsi Sulawesi Barat tergolong kedalam wilayah yang memiliki indeks risiko 166.49 (tinggi). Pada awal tahun 2021, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2021, terjadi gempa bumi dengan dampak yang cukup besar di

Indonesia. Data terakhir dari BNPB (Badan Penanggulangan Bencana Nasional) Total kerusakan dan kerugian Kabupaten Majene mencapai Rp 449,8 miliar. Data kerusakan Majene meliputi 4.122 rumah, 32 fasilitas ekonomi dan perkantoran, 17 fasilitas kesehatan dan 1 kantor militer. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene dipimpin secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene. Penanggulangan bencana gempa bumi Majene dilaksanakan oleh instansi-instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang terkait, diantaranya BPBD Kabupaten Majene, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Majene, Dinas PUPR Majene, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Majene, TNI/POLRI Kabupaten Majene, pihak swasta dan para relawan kemanusiaan. Kedua, masalah yang sangat menyita perhatian pemerintah Kabupaten Majene yaitu penjarahan pada distribusi logistik, ini merupakan masalah sosial dan masalah keamanan yang membutuhkan koordinasi dalam memecahkan masalah tersebut, Ketiga yaitu, penanganan gempa bumi di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi semua pihak terkait untuk membantu para korban dan relawan kesehatan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI TAHUN 2021 DI KAB.MAJENE “

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan rangkaian upaya yang meliputi tiga tahapan, yaitu sebelum bencana, tanggap darurat dan setelah bencana. Tujuan dalam penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu dengan baik. Dalam tahap pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan instansi yang mempunyai tugas dan peran penanggulangan bencana di daerah serta berperan sebagai lembaga koordinasi dengan instansi penanggulangan bencana terkait.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama Ahmad Yani (2017) berjudul “Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Di Kota Binjai “.Menggunakan

metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Bentuk koordinasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai dalam penanggulangan bencana banjir, upaya tersebut merupakan Bentuk koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi ini dilakukan sebelum, selama dan setelah bencana. Kendala dalam pelaksanaan koordinasi adalah meskipun Kota Binjai memiliki organisasi yang kompeten di bidangnya, namun sumber daya manusianya tidak berkompeten di bidangnya (basic disaster management). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk badan koordinasi sebagai lembaga

Kedua, Elny Lorensi Silalahi (2012) berjudul “Analisis Koordinasi Lintas Sektoral Satuan Tugas Penanganan Bencana Terhadap Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo 2010”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tidak diadakan pertemuan rutin prabencana Kabupaten Karo terkait kesiapsiagaan bencana Pertemuan dilakukan pada masa tanggap darurat saat bencana telah terjadi, nomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa berbagai Instansi bekerja secara sporadis dan individual, dan tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas

Ketiga, Elny Lorensi Silalahi (2020) berjudul “Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap “Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Unit aksi berjalan dengan lancar, terlihat dari pengaturan jadwal dan waktu, seperti pemberian informasi rapat koordinasi, sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana kabut asap yang akan dilakukan, dan koordinasi aksi untuk mencapai tujuan. Hasil yang diinginkan. komunikasi juga sangat efektif dan berjalan lancar ketika badan koordinasi dapat menjalankan tugasnya sesuai tupoksi masing- masing.. Pembagian kerja juga berjalan relatif lancar, yang dapat dibedakan dengan jelas dari tugas pokok dan fungsi instansi terkait. Oleh karena itu, tidak ada tugas ganda dalam pelaksanaannya.. Terakhir, pemerintahan daerah juga cukup disiplin dalam koordinasinya.

1.4 **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berikut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui unit-unit atau instansi yang berperan dalam koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Majene.
2. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh koordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Majene

II. METODE

Pendekatan penelitian menjadi dasar dalam melakukan suatu penelitian dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mempersiapkan atau memecahkan penelitian yang sedang dilakukan. Pendekatan mix method menurut Creswell (2010) adalah suatu cara dalam penelitian dengan penggabungan dua bentuk pendekatan penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan menurut pendapat Sugiyono (2015) menyatakan metode penelitian gabungan (mixed methods) sebagai metode penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif untuk digunakan secara bersamaan sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, reliable, objektif dan valid. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dicantumkan pada rumusan masalah.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (interview), lembar kuesioner (angket), dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang didukung dan dibantu oleh instrument lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene dalam penanggulangan bencana gempa bumi Tahun 2021.

A. Kesatuan Tindakan.

Pada hakekatnya koordinasi membutuhkan kesadaran setiap anggota organisasi atau organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau perannya dengan anggota atau organisasi lain agar anggota atau organisasi tidak bekerja sendiri. Oleh karena itu, konsep kesatuan tindakan adalah inti koordinasi, penguatan kelembagaan organisasi agar mampu memberikan kesatuan tindakan agar mencegah terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan tugas di lapangan khususnya pada

instansi-instansi yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Majene.

Dalam menjalankan penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Majene dibutuhkan banyak instansi. BPBD Kabupaten Majene dalam penanggulangan bencana gempa bumi banyak bekerja sama dengan dinas-dinas di Kabupaten Majene seperti masalah penanganan logistik dengan Dinas Sosial Kabupaten Majene, penanganan di bidang kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dalam penanganan bencana gempa bumi terjadi koordinasi antara BPBD dengan Dinas Sosial Kabupaten Majene, Dinas Kesehatan Majene, Dinas PUPR Kabupaten Majene, dan TNI/POLRI.

Kemudian dari hasil wawancara peneliti juga menyimpulkan bahwa kesatuan tindakan sudah berjalan dengan cukup baik karena adanya kesadaran bagi setiap anggota untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi/instansi lainnya agar tercapainya keserasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana gempa di Kabupaten Majene, namun dalam kesatuan tindakan yang dilakukan oleh koordinator yaitu dari BPBD untuk mencegah. Terjadinya tumpah tindih di lapangan itu masih belum efektif hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti terputusnya komunikasi pada masa tanggap darurat, kemudian keterlambatan dalam pembentukan tim penanggulangan dimana dinas-dinas lainnya masih sangat bergantung pada BPBD itu sendiri.

Tanggapan responden mengenai item pernyataan “BPBD melakukan pengaturan bersama instansi terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana” memiliki persentase sebesar 86,46% dari 65 responden dan masuk dalam kategori baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang terjadi antara BPBD dan para stakeholder telah terjalin dengan baik pada proses penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene.

Bahwa tanggapan responden mengenai item pernyataan “Adanya keserasian dalam menjalankan program BPBD dengan instansi terkait” memiliki persentase sebesar 86.46% dari 65 responden dan masuk dalam kategori baik . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keserasian yang terjadi antara BPBD dengan para stakeholder pada proses penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene sudah sangat optimal. Hal ini tentunya sangat mendukung situasi di daerah dalam menanggapi bencana di Kabupaten Majene. Tanggapan responden mengenai item pernyataan “BPBD telah merumuskan kebijakan secara tepat dan jelas untuk solusi penanggulangan bencana”, memiliki persentase sebesar 85.23% dari 65 responden dan masuk dalam kategori baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah

dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam koordinasi pada penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene sudah sangat baik. Menurut peneliti hal ini juga dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan daerah dengan efektif dan efisien.

B. Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat dari proses koordinasi yang baik. Melalui pertukaran informasi yang berkelanjutan, perbedaan individu dan divisi dapat diatasi dan kebijakan perubahan, penyesuaian program, program masa depan, dll dapat didiskusikan atau Didiskusikan.

Komunikasi yang dilaksanakan dalam koordinasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah, komunikasi adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah perilakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan tersebut. Sehingga tujuan untuk mengetahui dan mengukur proses koordinasi antara BPBD dan instansi-instansi lain yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 maka dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Komunikasi antara BPBD dengan instansi-instansi lain sudah berjalan baik pada saat sebelum terjadi bencana dan setelah terjadi bencana dengan cara mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekda secara ex-officio dan mengundang instansi-instansi lain untuk menetapkan status tanggap darurat.

Komunikasi yang dilakukan antara BPBD dan Dinas PUPR sebelum terbentuknya Tim Penanggulangan hanya berkomunikasi melalui via telepon, jika menunggu terbentuknya tim akan mengalami keterlambatan pada proses evakuasi oleh karena itu Dinas PUPR melakukan percepatan dengan tetap memperhitungkan informasi keadaan lapangan dari BPBD. Untuk mengukur indikator komunikasi antara BPBD dengan instansi-instansi lain yaitu sudah berjalan cukup baik namun beberapa faktor yang membuat komunikasi tersebut kurang optimal yaitu yang pertama yaitu pada saat masa tanggap darurat komunikasi terkendala disebabkan oleh jaringan telekomunikasi terputus dan sarana dan prasarana seperti HT masih kurang sehingga menyebabkan proses komunikasi itu tidak berjalan baik,

Secara terperinci pada dimensi komunikasi telah ditentukan indikator keberhasilan pada dimensi yaitu informasi, dan sebagai penyalur dan penghubung yang dapat dijelaskan melalui Penyajian sebaran jawaban dari 65 responden yang diambil dari pegawai instansi-instansi

yang terlibat untuk 2 indikator tersebut. Bahwa tanggapan responden mengenai item pernyataan “BPBD telah merumuskan kebijakan secara tepat dan jelas untuk solusi penanggulangan bencana”, memiliki persentase sebesar 84.61% dari 65 responden dan masuk pada kategori baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa BPBD sebagai penyelaras dan penghubung dalam proses penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene sudah cukup baik. Menurut peneliti hal ini harus menjadi hal dasar kepada seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab sebagai koordinator lapangan untuk menjadi penyelaras dan penghubung dalam proses koordinasi di Pemerintahan Daerah.

C. Pembagian Kerja

Duplikasi usaha oleh suatu unit organisasi atau kelompok dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi disebabkan adanya unsur pembagian kerja yang tidak jelas atau kurangnya kesepahaman antara penanggung jawab pelaksanaan program yang menghambat tercapainya hasil kerja yang optimal. Hasil sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui proses koordinasi antara BPBD dan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene maka pada indikator pembagian kerja untuk menjelaskan secara utuh koordinasi yang terjalin selama ini. Pembagian tugas yang dimaksud untuk menghindari tumpang tindihnya suatu pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dan instansi-instansi terkait terdapat pembagian kerja yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati

Majene Nomor: 104/HK/KEP-BUP/II/2021 tentang pembentukan pos komando penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Majene, dalam surat keputusan tersebut dinas-dinas terkait kemudian segera melaksanakan rapat koordinasi dengan menentukan pembagian kerja sesuai dengan tupoksi dinas masing-masing. Secara terperinci pada dimensi pembagian kerja telah ditentukan indikator keberhasilan pada dimensi pembagian kerja yaitu sinkronisasi dan perencanaan yang dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran jawaban dari 65 responden yang diambil dari pegawai instansi-instansi yang terlibat untuk 2 indikator tersebut.

Tanggapan responden mengenai item pernyataan “Koordinasi BPBD dan instansi terkait searah dan tidak tumpang tindih dalam penanggulangan bencana”, memiliki persentase 84.30% dari 65 responden dan masuk pada kategori baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja antara BPBD dengan para stakeholder sudah searah dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian kerja pada proses penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di

Kabupaten Majene. Bahwa tanggapan responden mengenai item pernyataan “BPBD melakukan koordinasi dalam hal pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan bersama instansi lainnya terkait bencana”. Memiliki persentase 84% dari 65 responden dan masuk pada kategori baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana gempa tahun 2021 di Kabupaten Majene sudah sangat optimal. Menurut pendapat peneliti perencanaan pada setiap program kerja adalah hal mendasar yang harus dimiliki setiap instansi Pemerintah Daerah agar tahap pelaksanaan program lebih terencana dan terarah.

D. Disiplin

Disiplin adalah suatu usaha untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan menghindari pemborosan waktu dan tenaga. Sedangkan menurut Hasibuan (2006), Disiplin adalah hati nurani dan kemauan seseorang untuk mengikuti aturan lembaga dan norma sosial yang berlaku. Sehingga untuk mengetahui dan mengukur proses koordinasi antara BPBD dan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan bencana gempa bumi maka pada indikator disiplin maka akan diuraikan bagaimana ketepatan waktu dan penertiban program kerja terhadap koordinasi penanggulangan bencana yang terjadi.

BPBD yang berperan sebagai *leading sector* telah menerapkan disiplin kerja yang maksimal dan baik dalam penanganan bencana pada saat masa tanggap darurat yang terjadi di Kabupaten Majene. Disiplin kerja terhadap koordinasi pada instansi-instansi itu berbeda dan masih kurang khususnya pada SDM yang masih kurang pemahaman terhadap kebencanaan dikarenakan sosialisasi dan pelatihan tidak berjalan dengan baik dari pemerintah daerah mengenai masalah kebencanaan, berbeda dengan Dinas Sosial sendiri yang telah memiliki Relawan Tagana dimana telah dipersiapkan dan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kebencanaan. Beberapa kendala dalam penanganan bencana bukan hanya dari faktor kedisiplinan pegawai namun faktor eksternal yaitu seperti belum adanya sarana dan prasarana dalam menunjang percepatan penanganan khususnya yang terjadi pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Majene.

Pentingnya disiplin kerja terhadap keberhasilan koordinasi sangat penting, dengan terwujudnya penanganan bencana yang tepat waktu. Secara terperinci pada dimensi disiplin telah ditentukan indikator keberhasilan pada dimensi disiplin yaitu efisiensi dan efektifitas yang dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran jawaban dari 65 responden yang diambil dari pegawai instansi-instansi yang terlibat untuk 2 indikator tersebut. Tanggapan responden mengenai item pernyataan “BPBD secara maksimal telah tepat waktu dalam penanggulangan bencana”, memiliki

persentase sebesar 82.46% dari 65 responden dan masuk dalam kategori baik. Tanggapan responden mengenai item pernyataan “BPBD secara maksimal telah tepat waktu dalam penanggulangan bencana”. Memiliki persentase sebesar 86.46% dari 65 responden dan masuk pada kategori baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa BPBD dan para stakeholder dalam proses penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene terdapat efisiensi pada pelaksanaan disetiap program kerja yang telah dilaksanakan. Menurut peneliti, efisiensi pada setiap program kerja harus tercapai agar pada tahap pelaksanaan program tidak boros waktu dan anggaran.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Ahmad Yani (2017) berjudul “Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Di Kota Binjai “. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Bentuk koordinasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai dalam penanggulangan bencana banjir, upaya tersebut merupakan Bentuk koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi ini dilakukan sebelum, selama dan setelah bencana. Kendala dalam pelaksanaan koordinasi adalah meskipun Kota Binjai memiliki organisasi yang kompeten di bidangnya, namun sumber daya manusianya tidak berkompeten di bidangnya (basic disaster management). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk badan koordinasi sebagai lembaga

Elny Lorensi Silalahi (2012) berjudul “Analisis Koordinasi Lintas Sektoral Satuan Tugas Penanganan Bencana Terhadap Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo 2010 ”. Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tidak diadakan pertemuan rutin prabencana Kabupaten Karo terkait kesiapsiagaan bencana Pertemuan dilakukan pada masa tanggap darurat saat bencana telah terjadi, nomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa berbagai Instansi bekerja secara sporadis dan individual, dan tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas

Elny Lorensi Silalahi (2020) berjudul “Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap “Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Unit aksi berjalan dengan lancar, terlihat dari pengaturan jadwal dan waktu, seperti pemberian informasi rapat koordinasi, sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana kabut asap yang akan dilakukan, dan koordinasi aksi untuk mencapai tujuan. Hasil yang diinginkan. komunikasi juga

sangat efektif dan berjalan lancar ketika badan koordinasi dapat menjalankan tugasnya sesuai tupoksi masing- masing.. Pembagian kerja juga berjalan relatif lancar, yang dapat dibedakan dengan jelas dari tugas pokok dan fungsi instansi terkait. Oleh karena itu, tidak ada tugas ganda dalam pelaksanaannya..Terakhir, pemerintahan daerah juga cukup disiplin dalam koordinasinya

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni koordinasi dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene telah berjalan dengan baik. Adapun tipe koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene adalah tipe koordinasi horizontal interrelated. Koordinasi horizontal interrelated adalah koordinasi antara instansi yang tugas dan fungsinya tidak sama, namun instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau memiliki kaitan secara intern maupun ekstern yang levelnya setara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Teori Koordinasi oleh Hasibuan (2006) untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama yaitu bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditinjau dari analisis yang dilakukan dalam data kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dengan hasil bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Majene dalam kategori sedang dengan presentasi 49,2%.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan sebelumnya bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2021 sudah berjalan optimal, hal ini didukung dari indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi berdasarkan dimensi dari Teori Hasibuan (2006) yaitu:

- ✓ Kesatuan Tindakan kesatuan tindakan sudah berjalan dengan cukup baik karena adanya kesadaran bagi setiap anggota untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi/instansi lainnya agar tercapainya keserasian dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana gempa di Kabupaten Majene.

- ✓ Komunikasi antara BPBD dengan instansi-instansi lain yaitu sudah berjalan cukup baik namun beberapa factor yang membuat komunikasi tersebut kurang optimal yaitu yang pertama yaitu pada saat masa tanggap darurat komunikasi terkendala disebabkan oleh jaringan telekomunikasi terputus dan sarana dan prasarana seperti HT masih kurang sehingga menyebabkan proses komunikasi itu tidak berjalan baik, kemudian yang kedua yaitu masih belum optimalnya pembentukan tim penanggulangan yang harus menunggu dari keputusan pemerintah untuk mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan pembagian kerja dan menentukan program-program pada pelaksanaan penanggulangan gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Majene.
- ✓ Pembagian tugas yang dimaksud untuk menghindari tumpang tindihnya suatu pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dan instansi-instansi terkait terdapat pembagian kerja yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 104/HK/KEP-BUP/II/2021 tentang pembentukan pos komando penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Majene.
- ✓ Disiplin pada proses koordinasi BPBD dengan instansi- instansi terkait sudah cukup baik dengan tetap menerapkan budaya disiplin kerja terhadap seluruh pembagian kerja ataupun tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab masing- masing instansi. Namun masih ada beberapa kendala pada masing-masing OPD yaitu kekurangan sarana dan prasarana,SDM yang masih kurang terlatih dan sosialisasi sebelum terjadinya bencana dinilai masih kurang.

2. Melalui indikator-indikator dalam mengukur pengaruh BPBD dengan memakai Teori Koordinasi Hasibuan (2006) dengan hasil menunjukkan bahwa sebanyak 9 atau 13,8% responden menilai Koordinasi pada penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Majene dalam kategori rendah, dan 49,2% dalam kategori sedang, dan 24 atau 36,9% berada dalam kategori tinggi. Dari hasil tersebut, Koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Majene dalam kategori sedang dengan presentasi 49,2%.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Hasibuan saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Tahun 2021 Di Kabupaten Majene untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Di Kabupaten Majene serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Tashakkori & Charles Teddlie. (2010). *Mixed Methodologi (Mengkombinasikan Pendekatan Kualitas dan Kuantitas)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BNPB. (2019). *Indeks Risiko Bencana* Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farah Amelia. (2010). *Ensiklopedia Bencana*. Yogyakarta: Garasi House Of Book